

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas oposisi dalam mengontrol pemerintahan di Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto, mengalami tantangan yang signifikan. Temuan utama menunjukkan bahwa fungsi oposisi, baik di ranah parlementer melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun di ranah ekstra parlementer, tidak berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya koalisi besar yang mendukung pemerintahan, yang mengakibatkan oposisi kehilangan kekuatan dan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi keberadaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat multitafsir atau sering disebut sebagai "pasal karet" telah berkontribusi pada penangkapan sejumlah aktivis dan jurnalis. Tindakan ini mencerminkan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia, di mana oposisi yang seharusnya berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas pemerintah justru terpinggirkan. Hemat penulis, inilah alasan yang paling mendasar mengapa Socrates menolak demokrasi. Sebab, dalam demokrasi siapa saja boleh mengakses kekuasaan dengan dukungan elektoral yang tak terbatas. Akibatnya, pemimpin yang tak berkompeten dan tidak berintegritas boleh berkuasa. Sebagai misal, Jokowi yang sebelumnya adalah tukang kayu telah menjadi Presiden dengan banyak rapor merah yang ditinggalkannya.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, kekuatan oposisi semakin dikerdilkan dengan narasi-narasi yang menyudutkan pihak oposisi. Oposisi dituduh menjadi kaki tangan dari kekuatan asing untuk mengganggu stabilitas nasional, media yang kritis diteror, dan peran militer yang diperluas. Dengan perluasan peran militer di ranah sipil, semangat dan prinsip demokrasi

menjadi luntur lantaran tata kelola sistem komando dipraktikkan dalam kehidupan bernegara.

Makna dari penelitian ini adalah pentingnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat untuk lebih peka dan aktif dalam mengawal proses demokrasi. Masyarakat perlu menyadari bahwa keberadaan oposisi yang kuat dan efektif adalah salah satu syarat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Untuk itu pendidikan politik yang diatur dalam kurikulum mesti selalu digiatkan. Sebab pendidikan yang masif akan membantu peserta didik mengembangkan cakrawala berpikirnya dan mengubah karakternya. Kedua hal ini sudah diatur sedemikian rupa dalam proses pendidikan, model kepemimpinan yang feodalistik dan paternalistik akan hilang dari bumi Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang matang.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Pemerintah

Pemerintah diharapkan untuk lebih membuka ruang bagi oposisi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan dialog dan komunikasi antara pemerintah dan partai oposisi, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk diskusi dan pertukaran ide. Selain itu, pemerintah perlu merevisi atau menghapus pasal-pasal dalam UU ITE yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, agar tidak ada lagi penangkapan yang tidak berdasar terhadap aktivis dan jurnalis.

Pemerintah perlu mengubah cara pandang dan narasi yang menyudutkan oposisi. Artinya pemerintah tidak menganggap bahwa sikap kritis oposisi merupakan tindakan yang mengganggu stabilitas bangsa dan merupakan suruhan asing. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat kembali diperkuat.

5.2.2 Saran untuk Masyarakat

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara demokratis perlu lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat diharapkan untuk terlibat dalam berbagai forum diskusi, baik secara langsung

maupun melalui media sosial, untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga perlu mendukung dan melindungi para aktivis dan jurnalis yang berjuang untuk kebebasan berekspresi, agar mereka tidak merasa terancam dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya sarana komunikasi yang semakin mudah diakses, masyarakat mesti mengoptimalkan penggunaan alat komunikasi. Sehingga masyarakat mampu menerima dan memberi informasi lebih cepat dan tepat. Kecepatan dan ketepatan informasi di media sosial itulah yang nanti akan mendobrak rekonstruksi demokrasi yang lebih mapan.

5.2.3 Saran untuk Partai Oposisi

Partai oposisi perlu memperkuat konsolidasi internal dan membangun jaringan yang lebih solid dengan elemen-elemen masyarakat sipil. Mereka harus mampu menyusun strategi yang lebih efektif dalam menyampaikan kritik dan alternatif kebijakan kepada publik. Selain itu, partai oposisi juga perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga suara mereka dapat didengar dan diperhatikan.

5.2.4 Saran untuk Penelitian Lanjutan

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada analisis lebih mendalam mengenai dampak dari koalisi besar terhadap kebijakan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian juga dapat mengeksplorasi perbandingan antara efektivitas oposisi di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi serupa. Dengan demikian, diharapkan penelitian lanjutan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika oposisi dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Pada akhirnya, secara keseluruhan dari isi penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk oposisi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus berupaya menjaga dan mengawal demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Athahirah, Astika Ummy, dan Nurliah Nurdin. “Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis.” Purbalingga: Sketsa Media, 2022.
- Bertalanffy, Ludwig von. *General Systems Theory: Foundations, Developments, Applications*. New York: Braziller, 1972.
- Bovaird, Tony, dan Elke Loeffler. “Understanding Public Management and Governance,” dalam *Public Management and Governance*, Tony Bovaird and Elke Loeffler (Eds.). London: Routledge, 2016.
- Budiman, Arief, ed. “Negara dan Masyarakat Madani.” *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas (2001).
- Davis, Gordon B, dan Margrethe H Olson. *Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development*. United States: McGraw-Hill, Inc (1984).
- Fawzia, Diana, Firman Noor, Ikrar Nusa Bhakti, Irine Hiraswari Gayatri, Nurliah Nurdin, Saafoedin Bahar, Sarah Nuraini Siregar, Syamsuddin Haris, dan Wasisto Raharjo Jati. *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Hamzah, Muchotob. *Agama dan Negara: Diskursus dan Praktik Politik Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Jogiyanto, Hartono M. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Ladiqi, Suyatno, dan Ismail Suardi Wekke. *Gambaran Demokrasi: Demografi, dan Perkembangan Muslim Minority View Project*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2018.

Power, Thomas, dan Eve Warburton, ed. “Kemunduran Demokrasi Indonesia,” dalam *Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi?* Trans. Usman Hamid, Darmawan Triwibowo, dan Anita Wahid. Jakarta: Gramedia, 2021.

Sari, Dian Cita. “Teori dan Konsep Manajemen Pemerintahan,” dalam *Manajemen Pemerintahan*, Dian Cita Sari, Robert Tua Siregar, Marto Silalahi, Marisi Butarbutar, Hery Pandapotan Silitonga, Heldy Vanni Alam, Ali Zaenal Abidin, Falimu, and Abdul Rahmat (Eds.). Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Pengembangan Secara Terpadu*. Bandung: Lingga Jaya, 2017.

Torfin, Jacob, and Christopher Ansell. “Strengthening Political Leadership and Policy Innovation Through The Expansion of Collaborative Forms of Governance,” dalam *Political Innovations Creative Transformations in Polity, Politics and Policy*, Eva Sørensen (Ed.). London: Routledge, 2020.

Wijoyo, Hadion, Aris Ariyanto, Agus Sudarsono, and Kiki Dwi Wijayanti. *Sistem Informasi Manajemen*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

JURNAL

Abdullah, Dudung. “Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Hukum POSITUM* 1, no. 1 (2016): 83–103.

Adhadina, Kheisa Rahma, Savira Eka Kusumawati, Nanjelina Adinda Fazya, Farizki Alam, dan Kuswan Hadji. “Peran Lembaga Kehakiman dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 1, no. 4 (2024): 28–33.

Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. “Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–155.

Agustino, Leo, M. Dian Hikmawan, Jonah Silas, “Keberlanjutan Demokrasi Indonesia ? Dua Tahun Pandemi COVID-19 yang Penuh Tantangan.” *IJD* 5, no. 2 (2023): 212–232.

Akbarrudin, Adika. “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca

- Amandemen UUD 1945.” *Pandecta Research Law Journal* 8, no. 1 (2013): 52–56.
- Ambun, Onessimus Febryan. “Jokowi dan Demokrasi Buzzer:(Membaca Hiperrealitas Politik Jokowi Dalam Ruang Publik Digital Indonesia).” *Akademika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero* 24, no. 1 (2024): 12–23.
- Anggraini, Mellisa. “Optimalisasi Good Governance Melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara.” *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, no. 3 (2024): 627–638.
- Attyyah Maranti, Idzhom Ummy, Nizar Denny Cahyadi, I Made Mas Mahayuna, Muhammad Apriadi Abdi Negara, dan Dewi Kurniawati. “Tinjauan Politik Hukum Peran Oposisi dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (2021): 150–159.
- Baital, Bachtiar. “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 19–38.
- Bria, Ignas Riez, I Nyoman Suandika, dan Kadek Dedy Suryana. “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023.” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 61–76.
- Christia, Adissya Mega, dan Budi Ispriyarso. “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia.” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 149–163.
- Darajati, Muhammad Rafi, dalam Muhammad Syafei. “Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya.” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 2 (2020): 106–122.
- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. “Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.” *YUSTITIA* 15, no. 1 (2021): 26–34.
- Dewi, Nadia Kusuma. “Reformasi 1998 : Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi Di Indonesia.” *HISTORIA VITAE Seri Pengetahuan dan*

Pengajaran Sejarah 04, no. 02 (2024): 76–90.

Effendi, Orien. “Lemahnya Suara Partai Oposisi Dibalik Sistem Voting dalam Pengambilan Keputusan di Parlemen.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 55–63.

Effendy, Erwan, Nur Baiti, dan Putri Hasanah. “Pengambilan Keputusan Sistem Informasi Manajemen Dakwah.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 4314–4320.

Ekoanindiyo, Firman Ardiansyah. “Pemodelan Sistem Antrian dengan Menggunakan Simulasi.” *Dinamika Teknik Industri* 5, no. 1 (2011): 72–85.

Guntara, Bima, dan Ayni Suwarni Herry. “Jurnal Pendidikan dan Konseling ‘Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.’” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 3, no. 1 (2022): 4.

Hakim, Muh Ridha. “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279–296.

Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih. “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–378.

Hasyim, Muhammad Syarif. “Oposisi Perspektif Al-Quran.” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 12, no. 2 (2016): 289–313.

Herlinanur, Nanda, Wahjoe Pangestoeti, Adrian Kurnia Sobana Putra, dan Rafidah Rahim. “Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance.” *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2024): 110–117.

Hidayatullah, Ihwan. “Pencerapan Nilai Hiburan dan Dakwah pada Anggota Pagar Nusa.” *Communicator: Journal of Communication* 1, no. 1 (2024): 1–15.

Huroiroh, Ernawati, Sakdi, Sulaiman, dan Mochammad Fauzi. “Konsep Negara

- Federasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2022): 18–41.
- Imanuel, Tommi, dan Indra Fauzan. “Analysis of Freedom of Expression in the Digital Age in the Issue of Electronic Information and Transaction Law in Indonesia.” *PERSPEKTIF* 12, no. 4 (2023): 1117–1126.
- Isaliani, Thimoty Pradhitya, dan Sunny Ummul Firdaus. “Konsep Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia.” *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 221–232.
- Isnaini, Isnaini. “Koalisi Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 93–104.
- Jasmine, Alifah, Kallista Remanu, Calista Sahlah Purwanto, dalam Nadhira Nurul Fajri. “Analisis Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital : Studi Kasus Greenpeace Indonesia.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, no. 2 (2024): 1–11.
- Jufri, Muwaffiq. “Pembatasan terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 40–47.
- Kaban, Ramon. “Perkembangan Demokrasi di Indonesia.” *Perspektif* 5, no. 3 (2000): 158.
- Kasim, Aminuddin. “Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif dari Presiden ke DPR.” *Jurnal Akualita* 6, no. 3 (2011): 1–19.
- Kholiza, Siti, Aulia Siti, Zahara Saragih, Panggih Nur, Adi Zindan, dan Baynal Hubi. “Tinjauan Peran Pendidikan Politik dalam Kehidupan Demokrasi Generasi Z.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 1461–1470.
- Koswara, Priandita, dalam Megawati Megawati. “Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 1 (2023): 47–62.

- Liyanto, David Cristian. “Kedudukan Partai Oposisi dalam Mewujudkan Check and Balances di Politik Hukum Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 131–142.
- Lutpiani, Elpi. “Implementasi Demokrasi di Indonesia.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2021): 1–13.
- Maritza, Dhiya Fahriyyah, dan Taufiqurokhman Taufiqurokhman. “Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14, no. 1 (2024): 71–84.
- Meinarsari, Alit Ayu, dalam Harsanto Nursadi. “Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi.” *Journal of Syntax Literate* 7, no. 8 (2022): 10508–10525.
- Mietzner, Marcus. “Indonesia’s Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society.” *Democratization* 19, no. 2 (2012): 209–229.
- Muksalmina, Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, dan Nabhani Yustisi. “Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 764–773.
- Mun’em, Abdul. “Prinsip-Prinsip Oposisi dalam Al-Qu’ran ‘Studi Analisis Pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.’” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 5, no. 2 (2023): 303–338.
- Munadi, M. “Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia.” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2019): 1–20.
- Murthada, Murthada, dan Seri Mughni Sulubara. “Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–121.
- Noor, Firman. “Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia.” *Masyarakat Indonesia* 46, no. 1 (2016): 1–17.

- Omara, Andy, Joko Setiono, Muhammad Ibrahim, dan Faiz Rahman. “Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen di Indonesia.” *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 33, no. 1 (2021): 161–187.
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, dan Feiby S Mewengkang. “Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.” *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023): 1–11.
- Prijanto, Prijanto, dan Rotua Valentina Sagala. “Eksistensi Oposisi dalam Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia dan Australia.” *Jurnal sosial dan sains* 4, no. 8 (2024): 816–828.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta ALW. “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–293.
- Purba, Bonaraja, Hasyim Hasyim, Ine Febrianti Siregar, Rifka Fauziah Batubara, Ruth Septaria Hutapea, dan Sinta Rahmawati. “Asas Kepastian Hukum dalam Perpajakan di Indonesia.” *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 2 (2023): 14–20.
- Purnama, Nurlita, Aditya Ardiansyah, dan Izdiyar Chairunnisa. “Perbandingan Parlemen di Indonesia dengan Amerika Serikat.” *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 80–88.
- Rachman, A A Muhammad Insany, dan Evi Dwi Hastri. “Implikasi Prinsip Right of External Self Determination Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional.” *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 2 (2021): 47–63.
- Ronaldo, Paskalis, Benedictus Eric Haryanto, dan Christophorus Rinovan Prasetyo Widi. “Melemahnya Oposisi di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke.” *Akademika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero* 24, no. 1 (2024): 48–60.
- Rosdianto, Didiet, Ismail Ismaili, dan Hartana Hartana. “Kewenangan yang Ideal Bagi Lembaga Komisi Yudisial untuk Memilih dan Menyetujui Seorang Hakim Agung yang Agung dan Berintegritas.” *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*

5, no. 2 (2024): 20–34.

Ryana Ananda, Nadilla. “Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat dari Transisi Politik Hukum di Indonesia.” *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 142–152.

Said, Abd Razak, dan Suparji Ahmad. “Hak Angket dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 361–376.

Sambhi, Natalie. “Jokowi’s Generals, Civilian Control, and the Power of the Panglima.” *Journal Of Global Strategic Studies: Jurnal Magister Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2023): 21–42.

Sanusi, Aris Riswandi, dan Cecep Darmawan. “Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif Terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat).” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2016): 24–40.

Sebastian, Tanius. “Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas.” *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 269–308.

Setyowati, Anggi, dan Pramukhtiko Suryo Kencono. “Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 18.

Sholikah, Luluk Imro’atus, Nabela Setyawati, dan Lutfi Firahayu. “Reformasi Marwah MK melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 242–279.

Siti Nurhayati. “Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi.” *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (2023): 14–30.

Sobarnapraja, Agus. “Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 1 (2020): 16–28.

Soraya, Sarah. “Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera di Luar Pemerintahan Joko

- Widodo pada Periode 2014-2019 Dan 2019-2024.” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 2, no. 2 (2021): 97–105.
- Subkhan, Edi. “Ideologi, Kekuasaan, dan Pengaruhnya pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965).” *Journal of Indonesian History* 7, no. 1 (2018): 19–34.
- Suryomenggolo, Jafar. “Politics of Marginalisation in Indonesia: The Jokowi Era.” *International Quarterly for Asian Studies* 55, no. 2 (2024): 137–153.
- Susanto, Mei. “Pelebagaan Oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia.” *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri* 1981, no. 35 (2012): 87–100.
- Wahyudi, Heri, dan Meita Istianda. “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Pemilahan Umum Presiden dan Anggota Legislatif.” *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 1 (2023): 229–246.
- Yulianingrum, Aullia Vivi, dan Muhammad Nurcholis. “Politik Hukum Penataan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial dan Implikasinya Terhadap Good Government dan Clean Government.” *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (2025): 1–17.
- Yusuf, M. “Perkembangan Budaya Politik di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu* 24, no. 1 (2016): 28–34.
- Zulfa M., Ananda Lisa P.S., Waziroh Nurul H., Aldy Nata M., dan Agustya Panca P. “Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan, Departemen Teknik Universitas Airlangga* (2018): 1–31.

INTERNET

- Adyatama, Egi. “Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi Tempo.” *Tempo.Co*. 2025. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227>.
- Aulia, Dea Duta. “Bamsoet Bicara Soal Pentingnya Keseimbangan Demokrasi & Hukum.” *Detik News*. 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7898423/bamsoet-bicara-soal-pentingnya-keseimbangan-demokrasi-hukum>

- Azizah, Ulvia Nur. "Apa Itu Oposisi dalam Pemerintahan? Ini Pengertian, Jenis dan Fungsinya." *Detik Jateng*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7204765/apa-itu-oposisi-dalam-pemerintahan-ini-pengertian-jenis-dan-fungsinya>.
- Costa, Fabio Maria Lopes. "Pintu Digembok, "Wawancara dengan Mulyono" Batal Digelar." *Kompas.Id*. 2025. <https://www.kompas.id/artikel/ironis-pementasan-teater-di-isbi-bandung-batal-karena-pintu-digembok>.
- Farmita, Artika Rachmi. "Demokrasi Indonesia di Bawah 10 Tahun Pemerintahan Jokowi." *Tempo.Co*. 2024. <https://www.tempo.co/data/data/demokrasi-indonesia-di-bawah-10-tahun-pemerintahan-jokowi-246153>.
- Gitiyarko, Vincentius. "Dilema Pendidikan Politik di Indonesia." *Kompas.Id*. 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/15/dilema-pendidikan-politik-di-indonesia>.
- Hilmy, Masdar. "Demokrasi Tanpa Nama." *Kompas.Id*. 2025. https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-tanpa-nama?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_traffic.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021." *The Habibie Center THC Insights*. 2021. <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/ac06aed73a921420af78a420d4f6f50c.pdf>.
- Maharani, Shinta. "Busyro Muqoddas: Pengirim Kepala Babi ke Tempo Primitif." *Tempo.Co*. 2025. <https://www.tempo.co/politik/busyro-muqoddas-pengirim-kepala-babi-ke-tempo-primitif-1222447>.
- MAJID, FACHRUROZI. "Menjaga Demokrasi dengan Kekuatan Oposisi." *Kompas.Id*. 2025. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/30/menjaga-demokrasi-dengan-kekuatan-oposisi>.
- Nababan, Willy Medi Christian. "Demokrat Tegaskan Berubah Sikap, Kini Dukung Jokowi Amin." *Kompas.Id*. 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/21/demokrat-tegaskan-berubah-sikap-kini-dukung-jokowi-amin>.
- Nikolaus Harbowo, Nina Susilo, Mawar Kusuma Wulan, Iqbal Basyari. "Mayor

Teddy, dari Ajudan Prabowo hingga Jadi Sekretaris Kabinet.” *Kompas.Id*. 2024.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/21/mayor-teddy-dari-ajudan-prabowo-hingga-jadi-sekretaris-kabinet>.

Permana, Rakhmad Hidayatulloh. “Nasib Oposisi di Indonesia dari Masa ke Masa.” *Detik News*. 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4604023/nasib-oposisi-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>.

Politik, Bocor Alus. “Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI.” *Tempodotco*. 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=z6nSQrYWJIY&t=3s>.

Putra, Nandito. “Minta Maaf ke Kapolri, Band Sukatani Tarik Lagu Bayar Bayar dari Semua Platform.” *Tempo.Co*. 2025. <https://www.tempo.co/hukum/minta-maaf-ke-kapolri-band-sukatani-tarik-lagu-bayar-bayar-bayar-dari-semua-platform-1209747>.

Redaksi. “Teror Kepala Babi Dan Tekanan Terhadap Kebebasan Sipil.” *Kompas.Id*. 2025. https://www.kompas.id/artikel/teror-kepala-babi-dan-tekanan-terhadap-kebebasan-sipil?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic.

Salam, Hidayat. “Pembahasan Panja RUU TNI yang Digelar di Hotel Menuai Kritik Tajam.” *Kompas.Id*. 2025. https://www.kompas.id/artikel/pembahasan-panja-ruu-tni-digelar-di-hotel-menuai-kritik-tajam?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic.

———. “RUU TNI Disahkan, Ratusan Mahasiswa Kembali Geruduk DPR.” *Kompas.Id*. https://www.kompas.id/artikel/ruu-tni-disahkan-ratusan-mahasiswa-kembali-geruduk-dpr?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic.

Saputra, Eka Yudha. “LBH Pers Desak Presiden Prabowo Minta Maaf Karena Rendahkan Peran Jurnalis Saat Sidang Paripurna.” *Tempo.Co*. 2025. <https://www.tempo.co/politik/lbh-pers-desak-presiden-prabowo-minta-maaf-karena-rendahkan-peran-jurnalis-saat-sidang-paripurna-1199591>.

Tim INFID. “Memperkuat Ruang Sipil (Civic Space) dalam Akses Indonesia Menuju OECD.” *INFID*. 2024. <https://infid.org/memperkuat-ruang-sipil-civic-space-dalam-aksesi-indonesia-menuju-oecd/>.

Valina Singka Subekti. “Oposisi di DPR Penting untuk Beri Alternatif Kebijakan.” *Publisher: Antara News*, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/2584477/oposisi-di-dpr-penting-untuk-beri-alternatif-kebijakan>.

Wicaksana, I Gede Wahyu. “What’s behind Indonesia’s Opposition to R2P?” *East Asia Forum*. 2021. <https://eastasiaforum.org/2021/07/15/whats-behind-indonesias-opposition-to-r2p/>.

Yulianus, Jumarto. “Lukisan ”Tikus Garuda” Karya Rokhyat Diturunkan Demi Keamanan.” *Kompas.Id*. 2025. <https://www.kompas.id/artikel/lukisan-tikus-garuda-karya-rokhyat-diturunkan-demi-keamanan>.

Yunus, Sapto. “Revisi UU TNI, Perluasan Pos Jabatan Sipil yang Dapat Diisi Prajurit TNI Jadi Sorotan.” *Tempo.Co*. 2025. <https://www.tempo.co/politik/revisi-uu-tni-perluasan-pos-jabatan-sipil-yang-dapat-diisi-prajurit-tni-jadi-sorotan-1218986>.

MANUSKRIP

Gultom, Boya Yanti. “Tinjauan Normatif Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Perundang-Undangan Di Indonesia.” Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara, Sumatra, 2025.

Hamid, Hamdan. “Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Kartika, Santi. “Sikap dan Kebijakan ‘Partai Oposisi’ di Parlemen (Studi Perbandingan Sikap Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Ruu Minerba).” Skripsi, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.